

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Dalam perspektif sistem parlemen bikameral dikonfigurasi dalam satu parlemen terdiri atas dua badan perwakilan yang masing-masing negara memberikan kewenangan pada masing-masing badan perwakilan tersebut berbeda-beda. Ada negara yang memberikan kewenangan lebih besar dari pada badan perwakilan yang lainnya, yang disebut dengan sistem weak bicameralism, sedangkan negara yang memberikan kewenangan relatif lebih besar terhadap kewenangan badan perwakilan lainnya disebut dengan sistem medium bicameralism, ada pula negara yang memberikan kewenangan yang seimbang antara badan perwakilan yang satu dengan lainnya disebut dengan strong bicameralism

Dua badan perwakilan terwadahi dalam satu parlemen, yang masing-masing negara memberikan nama berbeda-beda. di Amerika disebut dengan Conggres, sedangkan di Inggris disebut dengan Parliament, di Perancis disebut dengan Parlement. Semua produk hukum dari masing-masing badan perwakilan diberi satu nama keputusan yaitu hasil dari keputusan parlemen, bukan masing-masing badan perwakilan. Jadi karakter sistem parlemen bikameral, dalam satu parlemen terdiri atas dua badan perwakilan yang masing-masing memiliki kewenangan berbeda tetapi keputusan satu nama yaitu parlemen.

Dalam badan perwakilan di Indonesia yang diatur dalam UUD RI 1945 yang terdiri atas DPR RI dan DPD RI, masing-masing badan perwakilan tersebut tidak dalam satu wadah perwakilan seperti umumnya sistem bikameral melainkan masing-masing berdiri sendiri-sendiri dengan sebutan Lembaga Tinggi Negara. Masing-masing anggotanya dari kedua lembaga Tinggi Negara tersebut dipilih melalui pemilihan umum, namun kewenangannya sangat berbeda. DPR RI memiliki kewenangan legislasi, pengawasan dan anggaran, sedangkan DPD RI hanya diberi kewenangan mengajukan rancangan undang-undang dan ikut melakukan perundingan bersama DPR RI dalam rangka pembentukan undang-undang yang terbatas hanya meliputi bidang tertentu saja seperti hal-hal yang menyangkut otonomi daerah dan keagamaan tetapi tanpa diberi kewenangan mengambil keputusan dalam mengesahkan undang-undang. Keputusan pembentukan undang-undang tetap berada ditangan DPR RI

Mendasarakan pada konfigurasi di atas maka karakter dari sistem parlemen bikameral di Indonesia, bukan merupakan sistem parlemen bikameral murni melainkan sistem parlemen bikameral semu (*psedo parliament bicameralism*), karena dilihat dari demokrasi, anggota dari keduanya dipilih oleh rakyat secara demokratis sedangkan dilihat dari sudut kedaulatan rakyat hanya DPR RI yang memiliki fungsi parlemen sebagai perwujudan kedaulatan rakyat sehingga terlihat *ambigo*, ada dua badan perwakilan tetapi hanya satu yang memiliki fungsi parlemen

#### **4.2. Saran**

1. Seyogjanya sistem parlemen atau badan perwakilan dipertegas, menganut sistem parlemen unikameral atau bikameral sehingga tidak *ambigo*
2. Sejogjanya MPR RI segera mengadakan perubahan UUD RI 1945 yang ke V dalam rangka mempertegas sistem parlemen di Indonesia.

## DAFTAR BACAAN

- Abbas, Mukarom, *Negara dan Hak Asasi Manusia (Catatan Pergulatan Memperjuangkan Hak Masyarakat Pinggiran)*, Perdikan, Jakarta, 2009.
- Adiwijoyo, Surwarno, *Amandemen UUD 1945, Intermasa dan Pusat Kajian Reformasi* cet.1, Jakarta: :PAKAR.
- Afifin, Muhammad, *Teori & Filsafat Hukum, Idealisme filosofis & Problema Keadilan*, Dalam W Friedman “*Legel teori*,” Rajawali, Jakarta, 1990.
- Ahmad Saebani, Beni, dan Zulkarnaen, *Hukum Konstitusi*, cet.1, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012,
- Akbar, Patrialis, , *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, (Volume 1, Pemahaman Awal), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- ,-----, dan Wiwie Heryani, *Menjelajah Kajian Empiris terhadap Hukum*, cet.1, Kencana, Jakarta, 2012.
- Arief Sidharta, Benard, *Refleksi Tentang Struktire Ilmu Hukum sebuah penelitian tentang fundasi kefilosafatan dan sifat keimuan Ilmu Hukum sebagai landasan pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Ali Safa’at, Muchammad, *Parlemen Bikameral*, UB Press,. Malang, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly , *Perkembangan & Jonsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, cet.2, Sinar Grafika. Jakarta,2012.
- ,-----, “*Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*”, cet. I, Ind Hill-Co. Jakarta,1997.

- ,,-----, Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, cet.2, ed.2., Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- ,,-----, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta, 1998.
- ,,-----, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007
- ,,-----, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer. Jakarta, 2009.
- ,,-----, Perihal Undang-Undang, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- ,, -----, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Cet.2, Ed.1-2 , Jakarta, 2010,
- Amos, Abraham, Sistem Ketatanegaraan Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ali, H. Faried dan H. Andi Syamsu Alam, Studi Kegiatan Pemerintah, Refika Aditama, Cet.1, Bandung, 2012
- Astawa, I Gde Pantja dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, cet.2, Refika Aditama. Bandung, 2012
- Al Rasid, Harun, *Pengisian Jabatan Presiden*, cet. I, , Pustaka Utama Grafiti, Ja-karta, 1999
- Abdurrahman, Perkembangan Pemikiran Tentang Pembinaan Hukum Nasional Di Indonesia, CV. Akademika Pressindo, Jakarta,1989,
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Ed.1, Cet.6, Jakarta, 2015
- Ali, Zainudin, , Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

- Budiardjo, Miriam, 1988, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet.XI, Gramedia, Jakarta, 2000
- Badrun, Ubedilah, *Sistem Politik Indonesia Kritik dan Solusi Sistem Politik Efektif Bumi Aksara*, /Cet. 1, Jakarta, 2016.
- Basah, Sjachran, *Ilmu Negara Pengantar, Metode dan Sejarah Perkembangan*, cet.9, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Boedianto, Akmal, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pembentukan Perda APBD Partisipatif*, CV Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- Bruggink, J.J. H., Terj. Arief Sidarta, *Refleksi tentang Hukum*, cet.2, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1999.
- ,,-----, *Rechtsreflecties Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, Kluwer Deventer, Den Haag. 1993.
- .D.S. Voli, Wily, *Negara Hukum dalam Keadaan Pengecualian*, cet. 1, Sinar Grafika, Rawamangun, Jakarta Timur, 2013,
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum apa dan Bagai-mana Filsafat Hukum Indonesia*, cet. 4, Gramedia Pus-taka Utama, Jakarta, 2002.
- Darumurti, Krishna D dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, cet.1, Citra Adi-tya Bakti, Bandung, 2000.
- Daud, Abu Bakar dan Abu Daud Busroh, *Hukum Tata Negara*, Balai Aksara-Yudhistira-Saadiah, (tidak ada nama kota) dan (tidak ada tahun).
- Daud, Abu Busro. *Ilmu Negara*, cet 3, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Djokosutono, *Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1959.

Dhofir Zuhry, Ach, filsafat Timur Sebuah Pergulatan Menuju Manusia Paripurna, Cet. 1, Madani, Malang, 2013.

Dwi Purnomowati, Reny, Implementasi Sistem Bikameral Dalam Parlemen Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Friedman W., dalam Benny Simon Tabalujan, *Legal Development in Developing Countries The Role of Legal Culture*, Singapore, 2001.

Friedman, Lawrence Meir, "*Legal Culture and Social Development*", *Law and the Behavioral Sciences*, Lawrence M. Friedman and Stewart Macaulay (Eds), New York City Indianapolis-Kansas : The Bobbs-Merrill Company, INC. A Subsidiary of Howard W. SAM & CO., INC.

-----,----- Meir, , *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.

Farida Indrati Suprpto, Maria, Ilmu Perundang-undangan, Kanisius, Yogyakarta, 1998.

Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, cet.2, Yogyakarta, 2013

Gijssels, Jan Gijssels & Hoecke, Mark Van, Apakah Teori Hukum Itu, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1982.

Gie, The Liang, *Pengantar filsafat Ilmu*, Ed.2, cet.1, Liberty, Yayasan Study Ilmu dan Teknologi, Yogyakarta, 1991.

Guillermo O'Donnel dan Philippe C. Schmitter, *Transisi Menuju Demokrasi : Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpatian*, terjemahan. "*Transitions from Authoritarian Rules: Southern Europe*", LP3ES. Jakarta, 1993.

Gilissen , Emeritus John & Gorle, Emeritus Frits, *Sejarah Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.

- Gunawan, Bondan, , *Apa Itu Demokrasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- Harjono, *Transormasi Demokrasi* Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada akhir Abad 20*, ed. 1, Alumni, Bandung, 1994.
- Hadjon, Philipus Mandiri, *Pemerintahan Menurut Hukum (Wet-En Rectmatig Bestuur)*, tidak ada penerbit, 1992
- Huda, Ni'Matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, cet. 2, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Herabudin, *Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi*, Pustaka Setia, Cet.1, Bandung, 2016
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern* West Group. St. Paul, Minn, 1991
- Hoebe, I E. Adamson, *The Law of Premitive Man, A Study in Comparartive Legal Dynamics*, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, 1954,
- Horowitz, Donald L., *Perubahan Konstitusi dan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Cet. 1, Yogyakarta, 2014
- Idham Chalid, *Negara dan Neoborjuisme, Catatan Pinggir Anak Muda Jalanan*, Pijar Peradaban. Jakarta, 2009.
- Imam Kabul, *Dari Langit Menjadi Negarawan*, Nirmana Media, Jakarta, 2007
- Ismail, Basuki, *Negara Hukum-Demokrasi-Toleransi telaah filosofis atas John Locke*, Intermedia, Jakarta, 1991.

- Iswara,F., *Pengantar Ilmu Politik*, cet. 7, Bina Cipta, Jakarta, 1998.
- Isra, Saldi, Pergeseran fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, RajaGrafindo Persada, Cet 3. Jakarta, 2013
- Ibrahim, Johnny, Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayu-media Publising, Cet.1, Malang, Jawa Timur, 2005
- Ilmar, Aminuddin. Konstruksi Teori Dan Metode Kajian Ilmu Hukum, Hasanudin University Press, Cet.1, Makasar, 2009.
- Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, PT Alumni, Bandung, 2008.
- Kansil, C.S.T. & Julianto M.A., *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*, Erlangga. Jakarta, 1987.
- ,,----- & Christine S.T. Kansil, , *Ilmu Negara*, Pradnya Parami-ta, Jakarta, 2001
- Kattsoff, Louis O., , *Pengantar Filsafat*, alih bahasa Soejono Soemargono, Tiara Wacana. Yogyakarta, 1992.
- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia., Jakarta, 1976.
- Leopold Pospisil, *Anthropology of Law a Comparative Theory*, New York, Evanston, San Francisco, Harper & Raw Publishers, London,1971.
- Lubis, M Solly, , *Ilmu Negara*, cet. 3, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Lubis, M Solly, *Hukum Tata Negara*, , cet. 7, Mandar Maju. Bandung, 2008.
- Lyons, David, *Ethic And The Rule of Law*, London, New York, Cambridge University Press., Rochelle Melbourne Sydney, 1984.



- M Hadjon, Philipus, *Lembaga Tertinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Suatu Analisa Hukum dan Kenegaraan*, Foto Copy-Perc & Stensil “Djumali”. Surabaya, 1985,
- M. Unger, Roberto, *Teori Hukum Kritis Posisi Dalam Masyarakat Modern*, cet. V, Nusa Media. Bandung, 2011.
- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum Di Indonesia*, cet.1, Pustaka LP3ES. Jakarta, 1998.
- ,,----- , *Dasar & Strukture Ketatanegaraan Indonesia*, cet.2, ed. Revisi,: Rineka Cipta,. Jakarta, 2001.
- ,,-----, , *Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi*, cet.2, RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2011
- ,,----- , *Konstitusi Dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, ed. 1-3, Rajawali Pers. Jakarta, 2012.
- ,,----- dan Ibrahim Ambong, *Fungsi Legislatif Dalam Sisitem Politik Indonesia*, ed.1., cet.2,: RajaGrafindo Persada, Jakarta,1995.
- .  
-----,,-----, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Liberty, Ed.1, Cet.1, Yogyakarta, 1993
- Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Sesuai denagan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2002.
- Manan, Bagir, *Menyosong Fajar Otonomi Daerah*, cet.2, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yog-jakarta, 2002.

- ,,----- , *DPR, DPD dan MPR Dalam UUD 1945 Baru*, cet.1, FH-UII Press. Yogyakarta, 2003,
- Marbun, B.N., *Otonomi Daerah 1945-2005 Proses & Realita Perkembangan Otda, sejak zaman kolonial sampai sekarang*, cet.1, Pustaka Sinar Harapan, 2005,
- Marbun, SF & Moh Mahfud MD , Moh, *Pokok-Pokok Hukum Adminis-trasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- MS Bakry, Noor, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, cet.4, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Martono, Nanang, *Sosiologi Perubahan Sosial Prespektif Klasik, Modern, Posmo-dern, dan Poskolonial*, RajaGrafindo Persada, Cet.2, Jakarta, 2012
- Mulyosudarmo, Soewoto, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis ter-hadap Pidato Nawaksara*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997,
- Muslimin, Amrah, , *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni. Bandung, 19-82.
- Muslim Mufti, dan Hj Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, Pustaka Setia, Cet.1, Bandung, 2013
- M. Mas'ud Said, *Birokrasi di Negara Birokratis*, Universitas Muhamma-diyah, Cet. 3, Malang, 2012.
- Mustafa ,Delly, *Birokrasi Pemerintahan*, Alfabeta, Cet. 1, Bandung, 2013.
- Mukthie Fadjar, Abdul, *Sejarah, elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malng, 2016
- .....,,....., *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatane-garaan Indonesia*, Setara, Press, Malang, 2013.
- Mahmud, Peter, *Penelitan Hukum Kencana*, Cet.9, Jakarta, 2014

- Nurjaya, I Nyoman, *Pengelolaan Sumberdaya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, prestasi pustaka publisher. Jakarta, 2008.
- Nugraha, Nanang, *Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah*, Refika Aditama, Cet.1, Bandung, 2013
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Dan sistem Hukum Berdasar-kan Pancasila*, cet.1Media Perkasa. , Yogyakarta, 2013
- ,----- dan Abdul Halim Barkatullah, , *lmu Hukum & filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*, cet.4, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011
- Prasojo, Eko, , *Federalisme dan Negara Federal*, cet.1Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Eresco Jakarta, 2005.
- Prodjokoro, Wirjono, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Jakarta – Bandung,1981.
- Pujirahayu, Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryan-daru Utama. Semarang, 2005,
- Purbacaraka, Purnadi & M. Chaidir Ali, , *Disiplin Hukum*, Alumni, Bandung, 1986
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010.
- ,-----, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, alumni, Bandung, 1980.
- ,-----, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* , Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008

- Rasjidi, Lili dan I.B. Wyasa Putra, , *Hukum Sebagai Sistem*, cet.1, Remaja Rosda-karya. Bandung, 1993.
- Radjab, Dasril, , *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Seno Adji, Oemar, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1985
- Soehino, *Ilmu Negara* , ed.2, cet.3, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- ,,-----, *Hukum Tatanegara, Sumber-Sumber Hukum Tatanegara Indone-sia*, ed.1. cet.1, Liberty., Yogyakarta, 1985,
- ,,----- *Hukum Tata Negara “Perkembangan Pengaturan Mengenai pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah”* , ed.1, cet.1, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2010,
- ,,-----, , *Politik Hukum di Indonesia*, , cet.1, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta: 2010
- Soemantri, HRT M Sri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*, ed.1,Remaja Roesdakarya, Bandung, 2014.
- Soepiadhy, Soetanto, *Meredesain Konstitusi*, cet.1, Burung Merak Press, Bandung. 2008.
- Sunarno, Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Sabon, Max Boli, HaK Asasi Manusia, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Fakultas Hukum, Jakarta
- Suny, Ismail, , *Pembagian kekuasaan Negara*, cet.4, Aksara Baru, Jakarta, 1985.
- Surajiyo, *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia*, ed.1, cet.2, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.

- Sunggono, Bambang , *Hukum Dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994,
- Suriasumantri, Jujun S, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, cet.6, Sinar Grafika, Jakarta, 1990
- Syaukani, Imam & Thohari, Ahsin, , *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta., 2007
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, cet 7, Rajawali, Jakarta Utara, 1992
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenega-raan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994,
- Syaukani, et.al, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Cet.6, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Sigler, Jay A, *The Legal Sources of Public Policy*, Lexington books, D.C. Heath and company, Leinton, Massachusetts, Toronto, 1977.
- , ----- . & Beede, Benjamin R., *The Legal Sources of Public Policy*, Lexington Books D.C. Heath and Company, Lexington Massachusetts Toronto, 1977.
- Soekanto, Soerjono, Dkk, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Sulaiman, King Faisal, *Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013
- Sibuea, Hotma, *Asas-Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan*, Erlangga, irakas, Jakarta, 2010.
- Tahlib,,Dahlan H., Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, Hj., *Teori dan Hukum Konstitusi*, ed.revisi, cet.2, RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2001.

- Thoyibi, M., , *Filsafat Ilmu dan Perkembangannya*, cet.2, Muhammadiyah University Press. Surakarta, 1999.
- Van Peursen, C.A., *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*, terj. J. Drost, (De Opbouw van de Wetenschap een inleiding in de wetenschapsleer, Boom Meppet, Amsterdam, 1980),: Gramedia, Jakarta 1980.
- ,,-----, *Orientasi di Alam Filsafat*, penerj. Dick Hartoko, ( Filosofische Oriëntatie, Uitgerversmaatschappij J.H. Kok Kampen), cet.6, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1991,
- Von Schmid, J.J., *Ahli-ahli Pikir Besar Tentang Negara dan Hukum*, penerj. R.Wiratno dan Singomangkuto, cet. 6., Pembangunan., Jakarta, 1988.
- Wahjono, Padmo, , *Pembangunan Hukum di Indonesia*, : Ind-Hill Co, Jakarta, 1989
- ,,-----, tanggal 17 Nopember 1979 “*Indonesia ialah Negara yang Berdasarkan atas Hukum*”, diucapkan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Wiener, Norbert, *The Human Use of Human Beings*, Doubleday & Company Inc, Garden City New York, 1954.
- Wasino, , *Kepemimpinan di Indonesia Dalam Perspektif Sejarah Dan Budaya*, cet 1, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2014.
- Widjaja,A.W., *Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II*, Cet.3, RajaGrafindo Persada, Jakarta,1998,
- Wijoyo, Suparto, *Otoda Dari Mana Dimulai?* cet.1, Airlangga University Press, Su-rabaya, 2005
- Winarno, Budi, *Kebijakan Publik Teori & Proses*, PT Buku Kita, Jakarta, 2007.

William G. Andrews, *Constitutions and Constitutionalism*, 3rd edition, Van Nostrand Company, New Jersey, 1968.

Wheare, K.C., , *Modern Constitutions*, Oxford University, New York To-ronto, 1975

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Yuhana, Abdi, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Pasca Perubahan UUD 1945 Sistem Perwakilan Di Indonesia Dan Masa Depan MPR*

Zainuddin, A.Rahman, , *Kekuasaan Dan Negara Pemikiran Politik Ilmu Khaldun*, cet. 1. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.

### **Kumpulan Tulisan/jurnal**

*Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia* (kumpulan Tulisan), editor. Miram Budiardjo dan Ibrahim Ambong, RajaGrafindo Perkasa, Cet.2, Jakarta, 1995.

*Bikameral Bukan Federal* (Kumpulan tulisan), Editor Mustofa Muchdhor, Kelom-pok DPD di MPR, Cet.1, Jakarta, 2006

Titik TriwulanTutik, *Harmonisasi Fungsi DPD DAN DPR Pada Lemaga Perwakilan Rakyat dalam Sistem bikameral Guna Pelaksanaan Checks and Balance,S*, Yustisia Edisi 84 September- Desember2012.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Redaksi Sinar Grafika, *PerubahanUndang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang dasar 1945 asli*, Cet, 1, Jakarta, 2002

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Per-musyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib

**Intenet :**

Asshiddiqie, Jimly, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, 17 Mei 2013, Makalah “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII”, Denpasar: 14-18 Juli 2003, <http://legal.daily-thought.info>

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Deskripsi Konsepsi (DPD), Susunann dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPD, 2 Februari 2017 <http://www.dpr.go.id/prolegnas/deskripsi-konsepsi3/id/51>

Ekatjahjana, Widodo 2010, *Konsep Hukum Pemilu, Dasar Dan Asas-Asas Hukum Yang Melandasi Penyelenggaraan Pemilu*, (22 Agustus 2010),Widodoe ka-tjahjanasblog. [blogspot.com](http://blogspot.com) Inna junaenah’s Blog, 2010,

Kris Nugroho Jurusan Ilmu Politik FISIP, Universitas Airlangga, Problematika Dewan Perwakilan Daerah: Antara Fungsi Kons-titusional dan Realitas Politik, <http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/Problematika%20Dewan%20Perwakilan%20Dae-rah.pdf>

Liputo, Gusti Pandi, 2011, *Perbedaan Demokrasi Sebagai Bentuk Pemerintahan Dan Demokrasi Sebagai Sistem Politik*, (31 Januari 2011),gustinerz. [word press. com](http://wordpress.com)



Widagdo Eddyono, Luthfi, *Penguatan Partai Politik*, <http://lingkar-studipolitik.hukum.blog-spot.com/2008/02/-penguatan-partai-politik.html> , akses 14 Mei 2013